

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

M. Alif Alwan Sadek
NPP. 31.0953

Asdaf Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Studi Kebijakan Publik
Email: alifsadek02@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutia Rahmah, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) Stunting is a health issue that remains a national priority program, including in Majene Regency. To address this problem, the Regional Government of Majene Regency issued Regent Regulation No. 30 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction in Majene Regency. One of the goals of this policy is to reduce the high prevalence of stunting in Majene Regency. However, the policy has not yet achieved the expected outcomes. **Purpose:** This study aims to identify and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of stunting reduction policies in Majene Regency, West Sulawesi Province, and to formulate efforts to optimize the implementation of these policies. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collection methods including interviews, documentation, and observation. Data analysis techniques used include data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. **Result :** The study shows that the supporting factors for the implementation of stunting reduction policies in Majene Regency, West Sulawesi Province are: 1) Accuracy of stunting reduction policy instruments. 2) Clarity of policy design, including procedures, timeframes, resources, and target changes for reducing stunting prevalence. 3) Clarity of institutional design, including implementing organizations and coordination within and between implementing organizations. 4) Supervision by supervisory bodies. 5) Availability of necessary resources and high perceived benefits by the community. The inhibiting factors for policy implementation are: 1) Difficulties in implementing policy instruments. 2) Lack of community supervision. 3) Insufficient required resources. 4) Lack of community involvement. Efforts to optimize the implementation of stunting reduction policies in Majene Regency include developing stunting budget absorption as a solution to increase budget absorption in the coming year, providing iron tablets as a strategy to prevent stunting aimed at improving the health of future generations, and increasing community participation through regular counseling and baby measurements. **Conclusion:** The implementation of the Stunting Reduction Policy in Majene Regency shows that while some determinants such as the accuracy of instruments, policy design, institutional design, supervision by supervisory bodies, and high perceived benefits by the community still need improvement, the inhibiting factors include difficulties in policy instrument implementation, lack of community supervision, insufficient required resources, and lack of community involvement. Further efforts are needed to achieve a more effective reduction in stunting.

Keywords: : Implementation, Policy, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) bahwa stunting merupakan isu kesehatan yang saat ini masih menjadi program prioritas nasional hingga saat ini, salah satunya di Kabupaten Majene. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene. Salah satu tujuan kebijakan ini untuk menekan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Majene. Namun kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat serta mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah 1) Ketepatan instrumen kebijakan penurunan stunting. 2) Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu dan sumber daya serta perubahan target penurunan prevalensi stunting. 3) Kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana. 4) Adanya pengawasan oleh badan pengawas. 5) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu 1) Kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan. 2) Kurangnya pengawasan dari Masyarakat. 3) Ketidacukupan sumber daya yang dibutuhkan. 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat. Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene adalah Pengembangan serapan anggaran stunting sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun mendatang, pemberian tablet darah sebagai strategi pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa meskipun beberapa atribut faktor penentu seperti ketepatan instrument, desain kebijakan, desain kelembagaan, pengawasan oleh badan pengawas, dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat masih memerlukan perbaikan. Sementara faktor penghambat yaitu pelaksanaan instrumen kebijakan. pengawasan dari Masyarakat. 3) Ketidacukupan sumber daya yang dibutuhkan, keterlibatan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai penurunan stunting yang lebih efektif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan isu kesehatan yang saat ini menjadi program prioritas nasional. Stunting adalah keadaan tinggi badan balita di bawah minus dua deviasi berdasarkan standar World Health Organization (Susanti, 2022). Berdasarkan data stunting secara nasional, perkembangan prevalensi stunting dari tahun 2007 hingga 2022. Prevalensi stunting di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2007 hingga 2013 sedangkan sejak tahun 2013 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 36,8%, lalu mengalami penurunan menjadi 35,6% di tahun 2010. Pada tahun 2013, prevalensi ini kembali meningkat sebesar 37,2% dan mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2007 hingga 2022, prevalensi stunting mengalami

penurunan sebesar 15,2%. Target penurunan stunting pada tahun 2024 yang perlu dicapai sebesar 14%. Kenyataannya, pada tahun 2022 Indonesia masih berada pada prevalensi stunting sebesar 21,6%. Hal ini menunjukkan perlu penurunan prevalensi stunting sebesar 7,6% dalam 2 (dua) tahun.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada urutan pertama tingkat prevalensi stunting tertinggi sementara Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan kedua prevalensi stunting tertinggi setelah NTT. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di NTT mencapai 37,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 35,3%. Sebaliknya, pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Sulawesi Barat mencapai 33,8% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 35,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 1,2%. Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang menghambat dan mencari solusi yang efektif.

Tingkat prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 35%. Dari data tersebut, terdapat 3 (tiga) kabupaten yang di atas tingkat prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Majene menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Barat pada tahun 2022, mencapai 40,6%. Kabupaten Polewali Mandar menempati peringkat kedua dengan prevalensi stunting sebesar 39,3%, sementara Kabupaten Mamasa berada di peringkat ketiga dengan angka prevalensi 38,6%. Lebih lanjut, terdapat peningkatan angka prevalensi stunting di Kabupaten Majene dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene yaitu sebesar 35,09%, lalu mengalami peningkatan menjadi 35,7% pada tahun 2021. Bahkan, pada tahun 2022, tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40,6%.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Untuk mengatasi permasalahan tingginya tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2019 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Majene. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat pencegahan stunting. Namun, dilihat dari data tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene selama 3 (tiga) tahun terakhir masih terjadi peningkatan, yakni tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berhasil mencapai tujuan kebijakan yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, guna memahami secara mendalam hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan hasil perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Perbandingan ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari beberapa aspek, seperti fokus penelitian, tujuan penelitian, teori, dan metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan fokus penelitian, terdapat 10 kesamaan fokus penelitian ini dengan fokus penelitian sebelumnya, yakni implementasi kebijakan penurunan stunting (Damara, 2022; Kinanti & Yusran, 2022; Kogoya, 2023; Marisa, 2021; Maulana et al., 2022; Qorina et al., 2023; Riyanto & Paramansyah, 2019; Saputra et al., 2022; Sunaryo et al., 2022; Wiguna et al., 2021).

Ditinjau dari tujuan penelitian, terdapat 10 kesamaan penelitian sebelumnya yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan terkait pelaksanaan kebijakan penanganan stunting (Damara, 2022; Kinanti & Yusran, 2022; Kogoya, 2023; Marisa, 2021; Maulana et al., 2022; Qorina et al., 2023;

Riyanto & Paramansyah, 2019; Saputra et al., 2022; Sunaryo et al., 2022; Wiguna et al., 2021). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan teori penelitian, tidak ada satupun Penulis sebelumnya yang menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill dan Tosun sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) Penelitian yang menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (Damara, 2022; Kogoya, 2023; Qorina et al., 2023), 4 (empat) penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Maulana et al., 2022; Riyanto & Paramansyah, 2019; Sunaryo et al., 2022; Wiguna et al., 2021), 1 (satu) penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (Kinanti & Yusran, 2022), dan 1 (satu) penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Sabatier (Saputra et al., 2022).

Berkaitan dengan metode penelitian, 10 (sepuluh) penelitian terdahulu (Damara, 2022; Kinanti & Yusran, 2022; Kogoya, 2023; Marisa, 2021; Maulana et al., 2022; Qorina et al., 2023; Riyanto & Paramansyah, 2019; Saputra et al., 2022; Sunaryo et al., 2022; Wiguna et al., 2021) dan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan keperbaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, tetapi juga merumuskan strategi konkret untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan, termasuk pengembangan serapan anggaran stunting, pemberian tablet darah sebagai langkah pencegahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala. Pendekatan kualitatif yang digunakan, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi, memberikan wawasan yang komprehensif dan kontekstual terhadap tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan stunting di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk mendapatkan informan yang relevan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Inovasi dalam penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kebijakan, desain kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang lebih efektif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat serta mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Majene. Menurut Neuman (2017:66), penelitian kualitatif melibatkan penggunaan perspektif waktu dan usaha dalam mengumpulkan data serta melakukan analisis dokumen sebagai bagian dari proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan, seperti catatan lapangan, buku kode, jurnal, dan transkrip.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan fokus penelitian tersebut, Peneliti menggunakan teori Knill & Tosun (2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene

1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Dalam pemilihan instrumen yang optimal, pemerintah perlu mempertimbangkan kompleksitas lingkungan kebijakan dan kapasitas yang dimilikinya (Knill & Tosun, 2020). Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene merupakan masalah yang kompleks. Hal ini terlihat dari banyaknya aktor yang terlibat yang tersedia disajikan pada tabel 2 berikut:

Aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene

No	Jabatan	Nama	Instansi
1	Ketua	Wakil Bupati	Pemerintah Kabupaten Majene
2	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Majene
3	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	BKKBN Kabupaten Majene
4	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene	Dinas Kesehatan Kabupaten Majene
5	Sekretaris	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Majene	DP3AP2KB Kabupaten Majene
6	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene
7	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene	Dinas Sosial Kabupaten Majene
8	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene
9	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Majene	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Majene
10	Anggota	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Majene	Sekretariat Daerah Kabupaten Majene
11	Anggota	Camat Se-Kabupaten Majene	Camat Se-Kabupaten Majene
12	Anggota	Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Majene	Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Majene
13	Anggota	Bidan Desa Se-Kabupaten Majene	Bidan Desa Se-Kabupaten Majene
14	Anggota	Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Majene	Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Majene
15	Anggota	Tenaga Ahli Bidang Kesehatan	TPPS Kabupaten Majene
16	Anggota	Tenaga Ahli Bidang Gizi	TPPS Kabupaten Majene
17	Anggota	Tenaga Ahli Bidang Sosial	TPPS Kabupaten Majene
18	Anggota	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi	TPPS Kabupaten Majene
19	Anggota	Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi	TPPS Kabupaten Majene

Sumber: Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022

Berdasarkan data pada tabel 2 terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas kebijakan penurunan stunting tergolong tinggi. Adapun data anggaran dalam tabel

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Stunting 2023

Program	Anggaran
Rapat Besar Stunting	Rp 21.860.000
Sosialisasi Orang Tua Hebat Dalam Penurunan Stunting	Rp 49.745.800
Program Dapur Sehat Atasi Stunting	Rp 674.623.850
Pemberian makanan tambahan pada keluarga resiko stunting	Rp 4.061.725.000

Sumber: DPA DP3AP2KB (2024)

Tabel menunjukkan realisasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka stunting pada tahun 2023. Program yang dilakukan menunjukkan upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif orang tua serta pemangku kepentingan dalam program penurunan stunting. Alokasi anggaran ini mencerminkan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi dalam upaya penurunan stunting, mulai dari intervensi gizi langsung hingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat.. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Kesehatan Masyarakat dalam penanganan stunting di kabupaten majene masih ada hambatan terkait anggaran dalam pelaksanaan pada beberapa program.

a. Ketepatan Instrumen

Pemerintah Kabupaten Majene membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini bertindak sebagai motor penggerak untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga dalam hal gizi, kesehatan, dan pola asuh anak. Dengan membentuk TPK, pemerintah memimpin secara langsung dalam memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah stunting. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene ibu Hj Hanawati menerangkan bahwa:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene dengan mengacu pada Peraturan Bupati Majene Nomor 37 Tahun 2022 pemerintah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. TPK merupakan petugas Kesehatan dengan latar belakang Kesehatan dan gizi. Adanya Kerjasama antara petugas Kesehatan dan petugas KB. TPK terdiri dari bidan, Tim penggerak kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader KB. TPK memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga, terutama dalam hal gizi, Kesehatan dan pola asuh anak.

TPK berperan dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, sehingga upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif.

Tim Pendamping Keluarga

No.	Jabatan	Kualifikasi
1	Bidan	Sarjana Kesehatan
2	Tim Penggerak PKK	Pengurus PKK
3	Kader Keluarga Berencana	Pelatihan KB

Tabel sumber data: Dinas DP3AP2KB, diolah peneliti (2024)

Instrumen kebijakan berkaitan dengan kesesuaian jalannya kebijakan dan ketepatan dalam menentukan alat kebijakan yang sesuai dengan keadaan pemerintah dan lingkungan yaitu dengan adanya ketetapan instrumen berupa peraturan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene diatur dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Majene.

b. Kemudahan Pelaksanaan Instrumen

Pada pelaksanaannya, meskipun telah dilakukan upaya dalam implementasi kebijakan stunting, namun hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, yang merupakan objek kebijakan. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dan mendukung jalannya kebijakan stunting. Kurangnya pemahaman akan pentingnya upaya pencegahan stunting, serta minimnya partisipasi dalam program-program yang telah disusun, menjadi kendala yang signifikan dalam mencapai target-target kebijakan., kebijakan tersebut belum mencapai harapan yang diinginkan. Pada wawancara bersama tokoh masyarakat tersebut yaitu pak Qomaruddin menyampaikan bahwa :

Kami menyadari bahwa ada sebagian masyarakat yang kurang responsif terhadap bantuan yang diberikan, Mereka lebih cenderung memilih makanan instan yang praktis daripada makanan yang sehat dan bergizi, meskipun telah diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pola makan yang baik untuk mencegah stunting.

Fenomena ini mencerminkan tantangan nyata dalam mengubah perilaku dan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih sehat dan bergizi. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya pola makan yang baik, namun kebiasaan dan preferensi masyarakat yang cenderung memilih makanan instan tetap menjadi kendala utama.

Meskipun kebijakan penanggulangan stunting telah diimplementasikan dengan baik di Majene, namun pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat yang cenderung malas untuk datang ke posyandu. Berikut data pengukuran balita pada bulan agustus tahun 2023.

Data Balita Stunting Kabupaten Majene, Agustus 2023

No	Kecamatan	Sasaran	Ditimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BANGGAE I	1697	564
2.	TOTOLI	2128	1151
3.	BANGGAE II	992	602
4.	LEMBANG	1366	800
5.	PAMBOANG	2359	1566
6.	SENDANA I	2298	1483
7.	TAMMERODDO	1159	478
8.	SENDANA II	959	568
9.	MALUNDA	2198	1091
10.	ULUMANDA	730	301
11.	SALUTAMBUNG	372	230
Jumlah		16264	8834

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majene (2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah bayi yang ditimbang dalam kegiatan pengukuran bayi tiap kecamatan di Kabupaten Majene. Dari total 16.264 bayi yang menjadi target pengukuran, hanya 8.834 bayi yang benar-benar ditimbang. Hal ini mencerminkan tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan pengukuran bayi di Kabupaten Majene.

2. Desain Kebijakan

Menurut Knill & Tosun (2020), kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didalamnya mengatur jelas langkah pelaksanaan kebijakannya, lama waktu, dan sumber daya yang diperlukan, adapun faktor penghambat untuk tercapainya implementasi kebijakan karena kurang tepatnya tujuan dan persyaratan kebijakan yang tidak jelas.

a. Kejelasan Prosedur, Waktu, dan Sumber Daya

Atribut mengenai kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene diatur dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2019 tentang penurunan stunting di Kabupaten Majene dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan.

Tentu saja kami memberikan pelatihan kepada kader posyandu terkait Teknik pengukuran bayi yang akurat serta pentingnya intervensi dini dalam menangani stunting.

Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengukuran bayi telah dilakukan pelatihan kepada tenaga medis serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat.

Standar Anthropometri Penilaian Status Gizi Anak

No	Indikator	Status Gizi	Z-Score
1.	BB/U	Gizi Buruk	<-3SD
		Gizi Kurang	-3 SD s/d <-2 SD
		Gizi Baik	-2SD s/d 2SD
		Gizi Lebih	> 2SD
2.	TB/U	Sangat Pendek	<-3SD
		Pendek	-3 SD s/d <-2 SD
		Normal	>= -2SD
3.	BB/TB	Sangat Kurus	<-3SD
		Kurus	-3 SD s/d <-2 SD
		Normal	-2SD s/d 2SD
		Gemuk	> 2SD

Sumber : Buku Juknis Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Tabel 6 menjadi referensi yang digunakan dalam menilai status gizi anak di Kabupaten Majene, khususnya dalam mengidentifikasi kejadian stunting. Tabel ini menyajikan standar yang mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh anak usia 0-59 bulan. Dengan menggunakan tabel ini, petugas kesehatan dan peneliti dapat membandingkan hasil pengukuran antropometri anak dengan standar yang ditetapkan untuk usia dan jenis kelamin mereka. Hasil perbandingan ini memungkinkan mereka untuk menentukan apakah seorang anak termasuk dalam kategori stunting atau tidak, yang menjadi indikator utama dalam penilaian status gizi anak.

b. Jumlah Perubahan Target atau Tujuan Kebijakan dari Desain Awal Kebijakan

Pada desain awal kebijakan, target prevalensi stunting ditetapkan pada 27,27% untuk tahun 2022. Namun, seiring dengan perkembangan implementasi kebijakan dan berbagai faktor yang memengaruhi, terjadi penyesuaian target untuk tahun 2023. Pada tahun tersebut, target prevalensi stunting direvisi menjadi 23,08%. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengakomodasi tantangan serta perubahan kondisi yang mungkin terjadi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Majene. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang ada dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak dan mengurangi angka stunting di Kabupaten Majene.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	2022 (Awal Renstra)	TARGET 2023	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	AKI	130 per 100.000 lahir hidup	101 per 100.000 lahir hidup	175 per 100.000 Lahir Hidup
		AKB	9,1 per 1.000 lahir hidup	6,3 per 1.000 lahir hidup	11,37 per 1.000 lahir hidup
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat	Bumil KEK	11,60 %	11,00%	17,02%
		Prevalensi stunting	27,27%	23,08%	34,56%
		Balita Gizi Buruk	0,25 %	0,23 %	1,05%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama berdasarkan sasaran RPJMD pada tahun 2023 masih belum mencapai target yang diharapkan untuk semua indikator. Prevalensi data stunting yang juga belum mencapai target yang ditentukan karena masih cukup tinggi yaitu 34,56% dari target yg ada sebesar 23,08%.

3. Struktur Pengawasan

Menurut Knill & Tosun (2020), Pengawasan dapat dilakukan secara formal maupun informal tergantung kepada kebijakan yang akan diterapkan. Seperti pengawasan formal dilakukan oleh badan tertentu yang berwenang dan sudah berpengalaman dan sudah bersertifikat, sedangkan pengawasan informal lebih kepada masyarakat luas, seperti organisasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, atribut dari dimensi ini yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan oleh badan pengawas.

a. Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi kebutuhan serta harapan Masyarakat

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan

No	Bentuk Pengawasan	Mekanisme	Peran Masyarakat	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu	Menghadiri posyandu secara rutin dan memantau perkembangan berat badan dan tinggi badan balita.	Mengawasi kesehatan dan pertumbuhan balita.	Membantu mendeteksi stunting pada balita sedini mungkin.
2	Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli	Bergabung dengan kelompok-kelompok masyarakat peduli stunting untuk saling berbagi informasi dan pengalaman	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penurunan

	stunting	tentang pencegahan dan penanganan stunting.	stunting.	stunting.
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi program	Berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah.	Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan program.	Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program penurunan stunting.

Sumber; Diolah Penulis (2024)

Tabel di atas menggambarkan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan penurunan stunting. Bentuk pengawasan ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan keberhasilan upaya penurunan stunting. Namun, mekanisme pengawasan yang mengandalkan partisipasi langsung masyarakat dalam kebijakan penurunan stunting di Majene masih belum optimal.

b. Pengawasan oleh Badan Pengawas

Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas disebut juga dengan pengawasan secara formal. Penulis menambahkan wawancara sebagai acuan dalam atribut pengawasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Januari 2024 menyatakan bahwa:

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi penurunan stunting di Kabupaten Majene dilakukan melalui kontrol rapat koordinasi yang rutin dilakukan bersama Wakil Bupati. Dalam rapat secara berkala membahas perkembangan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi capaian yang telah dicapai, serta mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan melalui kontrol dari rapat koordinasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Badan Pengawas Stunting

No	Badan Pengawas	Tugas	Peran
1	Bappeda	Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.	Memberikan rekomendasi perbaikan program.
2	Inspektorat Daerah	Melakukan pengawasan internal untuk memastikan tata kelola program yang baik dan bebas dari korupsi.	Memberikan rekomendasi untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran.
3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur.
4	Ombudsman	Menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program.	Memastikan hak masyarakat terpenuhi dan program berjalan dengan baik.

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel tersebut menyajikan badan-badan pengawas yang mengawasi implementasi kebijakan penurunan stunting. Bappeda, Inspektorat Daerah, BPKP, dan Ombudsman bertanggung jawab memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan integritas program tersebut. Dengan melakukan pengawasan berkala dan memberikan rekomendasi, mereka memastikan tata kelola program yang baik, penggunaan dana yang efisien, serta menanggapi pengaduan masyarakat. Peran badan-badan pengawas ini sangat penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan penurunan stunting di Majene.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting diawasi oleh badan pengawas yang mengawasi alokasi anggaran, pelaksanaan program, dan efektivitas kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene.

4. Desain Kelembagaan

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh satu organisasi atau lebih melalui langkah-langkah yang implementasinya melibatkan koordinasi horizontal dan vertikal di beberapa unit administrative dan tingkatan (Knill & Tosun, 2020). Terdapat dua indikator yang menentukan keberhasilan dalam desain kelembagaan, yakni jumlah organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi.

a. Jumlah Organisasi Pelaksana

Organisasi yang terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting telah diatur secara resmi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai upaya dari berbagai organisasi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait lainnya. Melalui Satgas ini, diharapkan terjadi sinergi antar organisasi dalam implementasi program-program pencegahan stunting, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat lebih terintegrasi dan efektif.

Dari pernyataan tersebut diperkuat hasil wawancara yang telah Penulis lakukan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Majene pada tanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan bahwa:

Ada, Satgas ini menjadi sarana untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh berbagai instansi. Kami melakukan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan program, mengevaluasi capaian, serta mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan stunting.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang Penulis lakukan dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada tanggal 11 Januari 2024:

Satgas ini merupakan wadah kolaborasi penting dalam penanganan stunting di Kabupaten Majene, semua memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam upaya penurunan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan tentang organisasi pelaksana terkait pencegahan dan penurunan stunting yaitu tentang pembentukan satuan tugas rutin untuk membahas perkembangan program, mengevaluasi capaian, serta mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan stunting. Pembentukan satuan tugas ini dilandasi dengan dasar hukum Keputusan

Bupati Majene No. 218/HK/KEP-BUP /III/2022.

b. Koordinasi Internal dan Antar Organisasi

Koordinasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene dilaksanakan secara inter dan antar organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya:

Pertama wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 11 Januari 2024:

Wakil Bupati memegang peran kunci sebagai ketua Satgas stunting. Beliau bertanggung jawab dalam memimpin rapat-rapat koordinasi berkala untuk membahas perkembangan terkini terkait stunting di Kabupaten Majene.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sudah adanya koordinasi baik secara inter dan antar organisasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Majene dalam mengawasi masalah stunting. Kemudian, pandangan didukung oleh Kabid Kesehatan Masyarakat pada tanggal 11 Januari 2024:

Kami rutin memberikan laporan di grup via whatsapp terkait kegiatan penimbangan dan penyuluhan karena akan dikontrol dari pimpinan langsung. Biasanya akan ditanyakan apabila ada yang tidak mengirim laporan sehingga kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan semestinya.

Pernyataan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan menyatakan bahwa setiap organisasi terkait diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan program yang mereka jalankan, termasuk capaian, kendala, dan usulan perbaikan. Laporan-laporan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

5. Kemampuan Administratif

Knill & Tosun (2020) berpendapat, bahwa suatu lembaga harus melibatkan kapasitas atau kemampuan administrasi dalam hal personil hingga sumber daya dan anggaran. Adapun beberapa indikator yang menentukan keberhasilan dalam kemampuan administratif seperti ketersediaan sumber daya organisasi (personil, anggaran, informasi, dan teknologi pendukung).

a. Ketersediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan (Sumber Daya Manusia, Keuangan, Teknologi, Informasi)

Sumber daya menjadi salah satu pendukung dalam proses implementasi. Dalam teori Knill dan Tosun disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) sumber daya yang menjadi nilai ukur yang dijadikan faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud oleh Knill dan Tosun yakni sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi.

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam penanganan stunting, terutama dalam konteks pemberian informasi, pendidikan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene ibu Hj Hanawati menerangkan bahwa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pemerintah membentuk Tim Pendamping

Keluarga (TPK) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. TPK merupakan petugas Kesehatan dengan latar belakang Kesehatan dan gizi. Adanya Kerjasama antara petugas Kesehatan dan petugas KB. TPK terdiri dari bidan, Tim penggerak kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader KB. TPK memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga, terutama dalam hal gizi, Kesehatan dan pola asuh anak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Sumber Daya manusia yang memiliki pengalaman dan latar belakang di bidang Kesehatan, seperti bidan memang sangat penting dalam penanganan stunting. Tenaga Kesehatan berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan Kesehatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sehingga dapat melakukan deteksi dini serta intervensi yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi stunting.

Selain dari sumber daya manusia, anggaran juga menjadi salah satu aspek penting dalam penurunan stunting. Berikut data anggaran dinas kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Majene.

Anggaran Program/Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program	Anggaran
Pelayanan Kesehatan	Rp. 28.606.100.793
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 189.760.000
Program Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 204.447.930

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majene (2023)

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene tahun 2023, anggaran untuk program dan kegiatan kesehatan ibu dan anak telah dialokasikan dengan rinci. Pelayanan kesehatan secara umum mendapat alokasi anggaran terbesar, mencapai total Rp. 28.606.100.793. Sementara itu, program pelayanan kesehatan khusus untuk ibu hamil mendapatkan alokasi sebesar Rp. 189.760.000, sedangkan program pelayanan kesehatan untuk balita mendapatkan alokasi sebesar Rp. 204.447.930. Penjelasan ini mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten dalam memprioritaskan kesehatan ibu dan anak dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dilihat dari segi teknologinya, pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya memanfaatkannya dalam berbagai kegiatan penurunan stunting. Seperti, belum adanya pemanfaatan aplikasi atau platform digital untuk memantau pertumbuhan anak secara berkala dan menyediakan informasi gizi yang tepat kepada orang tua. Selain itu, belum dimanfaatkannya teknologi untuk mengorganisir dan menyampaikan program-program edukasi gizi kepada masyarakat secara efisien, misalnya melalui webinar, kursus online, atau aplikasi belajar interaktif. Penggunaan teknologi juga dapat ditingkatkan dalam hal pelaporan dan manajemen data untuk memantau efektivitas program penurunan stunting. Berikut pernyataan dari petugas posyandu yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan bahwa:

Kalau untuk laporan dari Masyarakat memang belum ada disediakan tempat pelaporan khusus,

biasanya hanya komplek dan sebagainya itu disampaikan melalui grup whatsapp yang kami buat.

Pernyataan petugas posyandu tersebut menunjukkan bahwa belum adanya penggunaan teknologi dalam sistem pengaduan Masyarakat terkait implementasi kebijakan penurunan stunting. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki ketersediaan sumber daya dan anggaran namun belum didukung dengan penggunaan teknologi.

b. Kecukupan Sumber Daya yang Dibutuhkan (SDM, Keuangan, Teknologi, Informasi)

Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan merujuk pada ketersediaan dan kemampuan pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Realisasi Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (DPA-P)	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	560.256.800,00	560.206.800,00	99,99 %
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.410.000,00	7.410.000,00	100%
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.	Persentase Ibu Hamil KEK	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	189.760.000,00	189.760.000,00	78,84%
		Prevalensi Stunting	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pelayanan Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bintek & Supervisi UKBM, Pemenuhan Alkes di Posyandu, Pengembangan Mutu & Kompetensi SDM, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Balita, BMHP & Kefarmasian.	28.606.100.793,00	24.921.930.593,00	87,12%
		Persentase Balita Gizi Buruk	Program Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.447.930,00	464.069.100,00	92,1 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dari pelaksanaan setiap Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis stunting secara umum cukup baik yang mencapai persentase 80,07%. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Kesehatan Masyarakat dalam penanganan stunting di kabupaten majene masih ada hambatan terkait anggaran dalam pelaksanaan program.

c. Kemampuan Melaksanakan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah rangkaian prosedur kegiatan yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kegiatan. SOP adalah pedoman yang dijadikan pendukung dalam proses kegiatan implementasi menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam hal pembuatan SOP, Penulis melakukan wawancara dengan petugas posyandu:

Pertama wawancara dilakukan dengan petugas posyandu pada tanggal 18 Januari 2024

Kami sebagai Petugas telah diberikan pelatihan dan sertifikat. Selain itu, buku saku yang disediakan juga sangat membantu kami dalam mengingat SOP yang harus diikuti

Kedua dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan pada sesi wawancara pada tanggal 11 Januari 2024:

Setiap petugas posyandu telah dibekali dengan pelatihan terkait pengukuran stunting dan gizi balita. Mereka juga telah diberikan buku saku sebagai pedoman sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majene telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam persiapan petugas posyandu terkait implementasi kebijakan penurunan stunting. Langkah-langkah tersebut meliputi pemberian pelatihan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta penyediaan buku saku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

6. Penerimaan Sosial

Tujuan utama dari implementasi kebijakan yakni untuk mengubah atau memodifikasi perilaku penerima kebijakan (Knill & Tosun, 2020:234). Hal yang penting bagi tercapainya suatu implementasi kebijakan yang sukses yaitu bagaimana masyarakat dapat menerima kebijakan dan manfaat dari kebijakan tersebut (Knill & Tosun, 2020:236). Dari kutipan di atas, dapat diuraikan bahwa penerimaan sosial dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

a. Tingkat Kemanfaatan Yang Dirasakan Masyarakat

Tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dalam implementasi kebijakan mengacu pada persepsi atau pandangan masyarakat tentang sejauh mana kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat atau nilai positif bagi mereka. Ini mencakup apakah masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan mereka, meningkatkan kualitas hidup, atau memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi.

Capaian Penurunan Prevalensi Stunting dalam 2 Tahun Terakhir

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prevalensi Stunting	27,27%	40,60%	23,08%	34,56%

Sumber: Dinas Kesehatan (2024)

Dari data yang tercantum dalam tabel di atas, terlihat bahwa meskipun prevalensi stunting masih di atas target yang ditetapkan pada tahun 2023, namun terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, prevalensi stunting mencapai 40,60%, namun berhasil turun menjadi 34,56% pada tahun 2023. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penurunan stunting yang dirasakan Masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dilihat dari tingkat manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika manfaat

yang dirasakan tinggi maka keterlibatan masyarakat juga tinggi dan sebaliknya jika tingkat manfaat rendah maka keterlibatan masyarakat nya otomatis rendah. Berikut temuan dari hasil wawancara Bersama ibu Ninuk Triyanti selaku anggota PKK menyampaikan bahwa :

Data stunting itu harus diupdate terus, sampai anak mencapai usia 5 tahun sedangkan ibu-ibu hanya aktif datang ke posyandu ketika anaknya masih menjalani vaksin dasar selama 2 tahun. Setelah itu, mereka cenderung malas untuk datang lagi. Jadi data stunting yang didapat tidak sesuai dengan realita yang ada karena grafik penimbangan beratnya tidak sesuai dengan penambahan umurnya jadi dianggap stunting.

Keterlibatan yang hanya berfokus pada pelaksanaan vaksin dasar selama 2 tahun mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap pentingnya pemantauan pertumbuhan anak masih rendah setelah usia tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius karena data stunting harus terus diupdate hingga anak mencapai usia 5 tahun untuk memastikan pengukuran berat badannya sesuai dengan realita pertumbuhannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Majene kemudian memperlihatkan data Balita stunting pada pengukuran yang dilakukan pada bulan Agustus 2023 sebagai berikut:

Presentasi stunting menurut kecamatan dan hasil operasi timbang di Kabupaten Majene Bulan Agustus 2023

No	Puskesmas	Sasaran	Diukur	
			Jumlah	%
1.	Banggae I	1697	564	32,34
2.	Totoli	2128	1151	54,09
3.	Banggae II	992	602	60,69
4.	Lembang	1366	800	58,57
5.	Pamboang	2365	1566	66,22
6.	Sendana I	2298	1483	64,53
7.	Tammerodo	1159	478	41,24
8.	Sendana II	959	568	59,23
9.	Malunda	2198	1091	49,64
10.	Ulumanda	730	301	41,23
11.	Salutambung	372	230	61,83
Jumlah		16264	8834	54,32

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 13 mengenai presentasi stunting menurut kecamatan dan hasil operasi timbang di Kabupaten Majene pada bulan Agustus 2023, terlihat bahwa partisipasi masyarakat

dalam program pemberian tablet darah masih belum optimal. Dari total sasaran yang ditetapkan sebanyak 16.264 individu, hanya sekitar 54,32% yang berhasil diukur.

3.2. Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penurunan stunting di Kabupaten Majene

Dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene, maka diperlukan upaya-upaya dari Dinas Kesehatan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang terjadi.

1. Pengembangan Serapan Anggaran Stunting

Adanya tantangan nyata terkait keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program penanganan stunting. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali alokasi anggaran untuk memastikan bahwa program-program penurunan stunting dapat berjalan secara optimal dan efektif.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
Pelayanan Kesehatan	Rp. 28.606.100.793	Rp. 24.921.930.593	87,12%
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 189.760.000	Rp. 149.606.784	78,84%
Program Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 204.447.930	Rp. 188.296.544	92,1%

Sumber: Dinas Kesehatan (2024)

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi anggaran untuk program yang ada belum terserap secara keseluruhan. Hal ini perlu diketahui penyebabnya dan diberi Solusi untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun mendatang. berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Kesehatan Masyarakat dalam penanganan stunting di kabupaten majene masih ada hambatan terkait anggaran dalam pelaksanaan program.

2. Pemberian Tablet Darah

Sejumlah upaya telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan tablet darah kepada remaja untuk mendapatkan calon ibu yang lebih sehat di masa depan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan, khususnya dalam konteks kesehatan ibu dan anak seperti yang disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majene sebagai berikut:

Dengan memberikan tablet penambah darah kepada remaja Perempuan (SMP dan SMA), terutama jika mereka memiliki riwayat kekurangan zat besi atau anemia, dapat membantu meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh mereka dan mempersiapkan tubuh mereka untuk kehamilan di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian tablet penambah darah harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dari pola makan dan kesehatan secara keseluruhan. remaja perempuan juga harus didorong untuk mengonsumsi makanan yang kaya zat besi dan nutrisi lainnya. selain itu, konsultasi dengan petugas kesehatan sebelum memulai suplementasi zat besi adalah penting untuk memastikan dosis yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor Kesehatan individu.

Dalam wawancara tersebut, penting untuk menekankan bahwa memberikan tablet penambah darah kepada remaja perempuan (SMP dan SMA), terutama yang memiliki riwayat kekurangan zat besi atau anemia, adalah langkah yang positif untuk meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh mereka dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan di masa depan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyuluhan dan Pengukuran Bayi Secara Berkala

Selanjutnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene melalui aksi pengukuran bayi. Dinas Kesehatan menyelenggarakan program rutin pengukuran bayi secara berkala di berbagai posyandu. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat standar seperti panjang atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Data yang diperoleh dari pengukuran ini akan menjadi dasar untuk menilai status gizi bayi dan mengidentifikasi potensi kasus stunting.

Program Rutin Pengukuran Bayi di Posyandu



Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perawatan kesehatan, diharapkan mereka akan lebih aktif dalam mengambil bagian dalam program-program kesehatan yang tersedia. Sementara itu, pengukuran bayi secara berkala membantu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih terperinci. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi yang berkualitas dan pemantauan yang teratur terhadap kesehatan anak-anak, membentuk fondasi yang kuat untuk masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa temuan utama yang diidentifikasi dari penelitian ini mencakup faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Temuan pertama menunjukkan bahwa ketepatan instrumen kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebijakan ini mencakup berbagai intervensi yang diperlukan untuk menurunkan prevalensi stunting, termasuk program pemberian tablet darah untuk ibu hamil dan penyuluhan gizi untuk masyarakat. Desain kebijakan yang komprehensif ini memungkinkan pelaksanaan berbagai intervensi yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup memadai dan fasilitas posyandu yang tersebar di berbagai wilayah merupakan faktor pendukung penting.

Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai memungkinkan pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Kurangnya sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi lainnya mengakibatkan program tidak berjalan seefisien yang diharapkan. Struktur pengawasan yang lemah juga menjadi kendala, mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting masih rendah, menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting perlu ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene adalah peningkatan anggaran untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk berbagai intervensi, penguatan koordinasi antara instansi terkait melalui pembentukan tim kerja yang solid dan terintegrasi, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kampanye penyuluhan gizi dan kesehatan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan setiap intervensi berjalan sesuai rencana dan melibatkan pihak ketiga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Majene dapat menurun secara signifikan, sehingga anak-anak di Kabupaten Majene dapat tumbuh sehat dan optimal.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah 1) Ketepatan instrumen kebijakan penurunan stunting. 2) Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu dan sumber daya serta perubahan target penurunan prevalensi stunting. 3) Kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana. 4) Adanya pengawasan oleh badan pengawas. 5) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu 1) Kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan. 2) Kurangnya pengawasan dari Masyarakat. 3) Ketidacukupan sumber daya yang dibutuhkan. 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat. Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene adalah Pengembangan serapan anggaran stunting sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun mendatang, pemberian tablet darah sebagai strategi pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala.

Keterbatasan Penelitian : Keterbatasan penelitian ini mencakup keterbatasan data dan informasi yang mungkin tidak mencakup seluruh aspek implementasi kebijakan, keterbatasan waktu dan sumber daya yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis, serta keterbatasan dalam generalisasi temuan ke daerah lain dengan kondisi berbeda. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif dapat menghasilkan subjektivitas dalam interpretasi data, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian dapat mempengaruhi akurasi dan representativitas hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan studi kuantitatif yang lebih representatif dan longitudinal untuk memantau perubahan implementasi kebijakan stunting, menggunakan pendekatan multidisipliner, menguji model intervensi baru, serta

memperkuat partisipasi masyarakat. Selain itu, penting untuk menganalisis kebijakan di berbagai daerah guna menemukan praktik terbaik, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dan melakukan evaluasi sistematis terhadap efektivitas program yang telah dijalankan. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi stunting.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T. (2017). 1 dari 3 Balita Indonesia Derita Stunting. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a560cb6376/1-dari-3-balita-indonesia-derita-stunting>
- Damara, F. (2022). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur*. 1–11.
- Kemendes. (2021). Buku Saku Kader Pintar Cegah Stunting.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Kemendes RI, 1–14. <https://www.litbang.kemdes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. Bloomsbury Academic. <https://books.google.co.id/books?id=FTFGEEAAAQBAJ>
- Kogoya, R. (2023). *Stunting di kecamatan tagime program studi kebijakan publik*.
- Marisa, M. (2021). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136–144. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.1>
- Qorina, A., Istiqomah, M., & Produktif, U. (2023). Penanggulangan Stunting Di Desa Sodong. *Community Development Journa*, 4(2), 3687–3691.
- Riyanto, R., & Paramansyah, A. (2019). AL-KHARAJ : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 1(19), 91–97. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4948>
- Saputra, anggara setya, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>
- Stunting.go.id. (2022). Untuk Percepat Turunkan Stunting, Penyadaran Pola Konsumsi Penting bagi Daerah Penghasil Protein Melimpah. <https://stunting.go.id/t/majene/>
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.28-37>

